



**TANGGAPAN, MASUKAN, DAN PERTANYAAN
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI
DALAM RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI DENGAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
RABU, 23 MARET 2022**

- Pembahasan : 1. Ketersediaan stok ikan menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional;**
2. Tindak lanjut Kunjungan Kerja Komisi IV;
3. Program Prioritas Tahun 2023; dan
4. Isu-isu aktual lainnya.

Disampaikan oleh : DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc.

No Anggota : A-84

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Shalom

Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan,

Salam Indonesia Raya

Yang Terhormat,

- 1. Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;**
- 2. Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI;**
- 3. Bapak Sekjen KKP dan seluruh Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran;**
- 4. Pimpinan PT. Perikanan Indonesia (Persero) dan Pimpinan PT. Garam (Persero) beserta jajaran.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik. Amin ya rabbal alamin.

Sehubungan dengan pembahasan materi rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan dan pertanyaan sebagai berikut;

1. Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa ketersediaan ikan menjelang Idul Fitri selama periode 4 tahun terakhir yang rata-rata meningkat sebesar 6% s/d. 8% berdasarkan laporan dari KPP harus ditingkatkan dan terus dipertahankan agar tidak terjadi kelangkaan ikan dan kenaikan harga di pasaran. Kami juga meminta Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menjaga stabilitas harga ikan konsumsi agar masyarakat dapat membelinya dengan harga terjangkau. Mengingat ikan juga bisa dijadikan salah satu alternatif pengganti daging saat harga daging terus naik terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
2. Meskipun stok ikan di nyatakan cukup, akan tetapi kondisi dilapangan saat ini, nelayan di beberapa daerah kesulitan mendapat solar untuk melaut, misalnya nelayan di daerah Sinjai, Polewali Mandar dan Lampung yang beberapa hari ini dikabarkan tidak melaut, Bagaimana kita bisa menyatakan aman-aman saja jika ada cukup banyak nelayan yang kesulitan melaut? Fraksi Partai Gerindra meminta tanggapan dari Bapak Menteri dan bagaimana strategi yang dilakukan agar keamanan stok ikan tetap terjamin. Demikian pula dengan kebutuhan nelayan sebagai pelaku mandiri yang berpenghasilan rendah. Apakah dapat terpenuhi juga menjelang idulfitri.
3. Fraksi Partai Gerindra terus mengingatkan dan meminta kepada Ditjen Perikanan Budidaya untuk melakukan penelitian terhadap fenomena kematian ikan secara massal yang terjadi hampir setiap tahun pada tempat budidaya ikan di beberapa waduk, seperti di perairan Waduk Cirata Cianjur, Jatiluhur P uwakarta, Singkarak Sumatera Barat, dan beberapa waduk lainnya di Indonesia yang mengakibatkan kerugian besar bagi petambak ikan. Kami juga meminta agar diadakan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada petambak ikan terkait langkah-langkah dan upaya yang harus dilakukan oleh pembudidaya dan petambak ikan dalam mengantisipasi serta meminimalisir dampak kejadian tersebut.
4. Dengan Tema RKP (Rencana Kerja Prioritas) Tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

dengan total usulan pagu indikatiff KKP tahun 2023 sebesar Rp15 triliun, Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan terkait usulan anggaran Rp70 miliar untuk mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kami menilai anggaran ini sangat kecil padahal kegiatan tersebut masuk masuk kategori PN2 (Prioritas Nasional ke dua).

5. Beberapa program bantuan dari KKP untuk Jalur Aspirasi sudah tiba, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan apresiasi karena telah direalisasikan seperti mesin pakan dan bioflok. Akan tetapi kami meminta koordinasi dari PIC kementerian, agar lebih komunikatif dan menginformasikan kedatangan/rencana kedatangan bantuan tersebut. Sehingga kami yang mengusulkan tidak mengetahuinya belakangan.
6. Aktivitas penambangan timah laut di Perairan Matras, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berlangsung sekitar sepuluh tahun. Kondisi ini, menimbulkan konflik antara nelayan [warga] dengan KIP [Kapal Isap Produksi] dan penambang timah ilegal, serta membuat air laut tercemar yang berujung rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut. Demikian juga dengan ditemukannya KIP [Kapal Isap Produksi] oleh KKP pada pertengahan Februari 2022. Dimana KIP tersebut tidak memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut [PKKPRL] Terkait hal ini, Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan Bapak Menteri, dan diperlukan peraturan tentang reklamasi laut yang jelas di Bangka Belitung.
7. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sawu yang dinakhodai oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah inkonstitusional atau membangkang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91 Tahun 2021. Fraksi Gerindra menilai rencana zonasi tersebut sebagai perampasan ruang bagi nelayan, karena nelayan kita tidak mampu bersaing dengan Kapal-kapal besar.
8. Terkait rencana perikanan tangkap tentang sarpras Kalaju sebanyak 250 lokasi. Fraksi Partai Gerindra meminta agar dapat dipertimbangan untuk wilayah perikanan pesisir yg masih belum tersentuh. Karena dengan adanya program ini akan sangat membantu pemerataan potensi wilayah nelayan serta perikanannya.
9. Terkait asuransi nelayan sebanyak 250.000 orang. Fraksi Partai Gerindra meminta agar asuransi ini disalurkan kepada nelayan-nelayan di pesisir yang

benar-benar membutuhkannya untuk melaut. Sehingga nelayan tangkap dapat merasakan manfaat program yang baik ini.

10. Fraksi Partai Gerindra meminta agar bantuan berupa excavator sebanyak 250 unit juga diprioritaskan kepada wilayah-wilayah perikanan yang membutuhkan alat-alat berat agar para petambak juga dapat lebih meningkatkan produksi perikanan budidaya meraka.
11. Fraksi Partai Gerindra meminta agar Kampung Perikanan Budidaya sebanyak 150 lokasi sebaiknya diberikan kepada kelompok masyarakat yang sudah memiliki tradisi dalam hal budidaya, agar visi KKP terkait meningkatkan produksi perikanan nasional dapat tercapai.
12. Sehubungan dengan tindak lanjut Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI, Fraksi Partai Gerindra meminta agar:
 - a. KKP perlu melakukan percepatan terhadap operasionalisasi Pelabuhan Perikanan Untia, sehingga keberadaannya segera dapat dimanfaatkan dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
 - b. KKP memberikan penjelasan mengenai penyebab ketidak sanggupuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim dalam pengadaan kapal 5 GT bagi nelayan (APBN KKP TA 2022. Bagaimana solusinya?
 - c. Perlu dilakukan kajian terlebih dahulu terhadap Pengembangan PPS Belawan berupa pengadaan lahan pelabuhan melalui reklamasi, agar kegiatan reklamasi tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, ekosistem perairan dan masyarakat sekitar.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;

Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI;

Bapak Sekjen KKP, dan seluruh Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran;

Pimpinan PT. Perikanan Indonesia (Persero) dan Pimpinan PT. Garam (Persero) beserta jajaran.

Demikian tanggapan, catatan, masukan, dan pertanyaan Fraksi Partai Gerindra dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

RI ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Indonesia Raya.*

KOMISI IV FRAKSI PARTAI GERINDRA DPR RI

G. Budisatrio Djiwandono	- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Ir. KRTH. Darori Wonodipuro, M.M., IPU	- Kapoksi
DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc.	- Anggota
Ir. H. TA Khalid, M.M.	- Anggota
DR. H. Azikin Solthan, M.Si.	- Anggota
Ir. Dwita Ria Gunadi	- Anggota
Ir. Endro Hermono, M.B.A	- Anggota